



Bersama 6 Tahanan Lain

Malam Pertama Sulit Tidur,

Istri Bawakan Kasur

AMLAPURA, NusaBali

Asisten II Setdakab Karangasem, Ida Bagus Made Oka, 52, yang dijebloskan ke sel tahanan selaku tersangka kasus dugaan korupsi proyek pipanisasi, huni Ruang Mapenaling (Masa Pengenalan Lingkungan) LP Karangasem, bersama 6 tahanan lainnya. Pada malam pertama mendekam di sel tahanan, Selasa (28/4), pejabat asal

Banjar Brahmama, Desa Sibetan, Kecamatan Bebandem, Karangasem ini mengaku sulit tidur.

Ruang Mapenaling yang ditempati IB Made Oka berada di Blok Timur LP Karangasem. Ruangan ini berkapasitas 10 orang. Saat ini, ada 7 tahanan yang huni Ruang Mapenaling, termasuk IB Made Oka, tersangka kasus proyek Pipanisasi Karangas-

em yang baru dijebloskan ke sel, Selasa sore sekitar pukul 16.00 Wita, sebagai tahanan titipan dari kejaksaan.

Kepala LP Karangasem, Kusbiyantoro, juga membenarkan IB Made Oka ditempatkan di Ruang Mapenaling Blok Timur bersama 6 tahanan lainnya. Hanya saja, Kusbiyantoro enggan merinci identitas 6 tahanan tersebut dan mereka terlibat dalam

kasus apa.

"Yang jelas, penghuni di Ruang Mapenaling I ada 7 orang, termasuk IB made Oka. Perlakuan terhadap ketujuh tahanan ini sama, tidak ada yang diistimewakan," ungkap Kusbiyantoro saat dikonfirmasi NusaBali di LP Karangasem, Rabu (29/4).

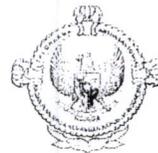
Menurut Kusbiyantoro,

Bersambung ke Hal-15 Kolom 1

Edisi : Kamis, 30 April 2015

Hal

: 1 dan 15



Malam Pertama Sulit Tidur, Istri Bawakan Kasur

SAMBUNGAN DARI HALAMAN 1

6 tahanan yang sudah lebih dulu huni Ruang Mapenaling I tidak tahu siapa sejatinya IB Made Oka, yang baru masuk, apakah pejabat atau warga biasa. Karena itu, mereka menyambut biasa saja kedatangan IB Oka, birokrat yang terseret sebagai tersangka kasus proyek PIPANISASI Karangasem 2009-2010 dalam kapasitasnya selaku Pejabat Pelaksana Teknis.

Sementara itu, sehari pasca masuk sel tahanan, IB Oka mendapat kunjungan dari istri tercintanya, Ida Ayu Diana Sukma, 51, Rabu pagi. Pantauan NusaBali, istri IB Oka ini datang ke LP Karangasem seorang diri, Rabu pagi sekitar pukul 10.00 Wita. Perempuan berusia 51 tahun ini membawakan suaminya sebuah kasur lipat, cedok (gayung), handuk, sabun, gantungan baju, serta pakaian secukupnya.

Diana Sukma sempat ngobrol sekitar 40 menit, sebelum memasuki Ruang Mapenaling I LP Karangasem di mana suaminya ditahan. Sang suami, IB Oka, juga sempat keluar mengambil kiriman barang yang dibawa istrinya. Saat itulah NusaBali sempat mencegah IB Oka sembari menanyakan kondisinya selama semalaman mendekam di sel tahanan.

Kepada NusaBali, IB Oka mengakui dirinya sudah tidur pada malam pertama di sel tahanan. "Saya sebenarnya tidak bisa tidur. Memang sempat tidur, tapi bangun lagi. Begitu seterusnya, tidur sebentar, terbangun lagi. Tidurnya tidak nyenyak. Ya, namanya juga di LP," cerita IB Oka.

Menurut IB Oka, dirinya juga terpaksa menyantap

makanan yang disediakan di LP Karangasem, walau suasana hatinya kurang nyaman, karena lapar. "Ya, saya paksa-paksakan saja makannya. Tolong ikut mendoakan ya, agar selama saya di sini (LP) baik-baik saja," pintanya.

IB Oka merupakan satu dari 143 orang yang menghuni LP Karangasem saat ini. Dia masuk kategori tahanan bersama 11 orang lainnya. Sedangkan sisanya, 131 orang, berstatus narapidana alias telah divonis bersalah. Dari 131 narapidana tersebut, 9 orang di antaranya perempuan.

IB Oka terseret sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek PIPANISASI Karangasem yang menyebabkan kerugian negara Rp 3,7 miliar, bersama 10 orang lainnya. Termasuk di antara mereka adalah mantan Kadis PU Karangasem, I Wayan Arnawa, yang bahkan telah divonis 1,5 tahun penjara plus denda Rp 100 juta di Pengadilan Tipikor Denpasar, 5 Maret 2015 lalu.

Setelah IB Oka ditahan, selanjutnya akan ada empat tersangka lagi yang menyusul diserahkan penyidik kepolisian ke kejaksaan berikut berkas dan barang buktinya. Informasi yang dihimpun NusaBali dari sumber penyidik Polda Bali, empat tersangka yang segera akan dilimpahkan itu termasuk Ni Kade Novianti ST.

Perempuan yang notabene keponakan Bupati Karangasem Wayan Geredeg ini dijerat sebagai tersangka dalam kapasitasnya selaku Koordinator Pengawas Proyek PIPANISASI. Sedangkan tiga tersangka lainnya yang segera akan menyusul dilimpahkan tahap II dari penyidik kepolisian ke kejaksaan, masing-masing Ir Imam Wijaya Santosa, Ir

Dono Purwoko, dan Parno Trisnihadiono ST. Ketiganya dari PT Adhi Karya.

IB Oka menjadi PNS sejak 1 April 1997, diangkat dengan Golongan III A di Dinas PU Karangasem. Tahun itu pula, dia dipromosikan menjadi Kepala Seksi Tata Kota Dinas PU Karangasem. Selanjutnya, dia dialihkan menjadi Kasubsi Pembangunan Perumahan Dinas PU Karangasem (1997), Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PU Karangasem (2008), hingga diangkat menjadi Kadis PU Karangasem (2012), dan Asisten II Setdakab Karangasem (2014).

Birokrat kelahiran 19 Januari 1963 ini menempuh pendidikan terakhir di Fakultas Teknik Unud Denpasar hingga tamat tahun 1992 silam. Pendidikan formalnya diawali dari SDN 1 Sibetan (tamat tahun 1975), SMPN Sibetan (tamat 1979), dan SMAN Karangasem (tamat 1982). Sedangkan istrinya, Ida Ayu Diana Sukma, kini jadi PNS di Pemprov Bali. Dari pernikahannya itu, mereka dikaruniai 4 anak.

Hingga Rabu kemarin, Bupati Karangasem Wayan Geredeg belum berhasil dikonfirmasi terkait ditahannya sang Asisten II, IB Made Oka. Demikian pula Sekda Karangasem I Gede Adnya Muliadi dan Kepala Badan Kepengawasan Daerah (BKD) Karangasem, I Nyoman Tari, belum bisa dihubungi.

Sedangkan Kabag Humas dan Protokol Setdakab Karangasem, I Made Supartha, mengaku tak bisa bicara banyak terkait penahanan sang Asisten II. "Mengetahui kelanjutan jabatannya, siapa penggantinya jadi Plt Asisten II, kami masih berkoordinasi dengan pimpinan," ujar Made Supartha saat dikonfirmasi di Amlapura, Rabu kemarin. **k16**

Edisi : Kamis, 30 April 2015

Hal : 1 dan 15



Inspektorat Kumpulkan Data Simantri

'Ada Faktor Politik Lolosnya Simantri'

Selain politik, masalah geografis di satu daerah juga memberikan dampak gagalnya program Simantri. Misalnya yang dekat dengan perkotaan dimana lahan untuk menyediakan rumput sudah sangat susah.

DENPASAR, NusaBali

Inspektorat Pemprov Bali mengumpulkan data terkait dengan adanya laporan program



Ketut Teneng

Sistem Pertanian Terintegrasi (Simantri) ada masalah. Menurut Inspektur Pemprov Bali, Ketut Teneng di Denpasar, Rabu (29/4), program Simantri yang sempat dibahas di DPRD Bali dengan Gubernur Bali selalu rutin dievaluasi. Kalaupun ada yang bermasalah hal itu dipengaruhi faktor teknis, kendala-kendala di lapangan termasuk persoalan politik sehingga verifikasi men-

jadi terlemahkan sendiri.

Menurut Teneng, salah satu kendala di lapangan ketika verifikasi berjalan, di satu desa kelompok yang seharusnya tidak layak dapat program Simantri menjadi layak. Karena ada tokoh politik di desa itu yang memberikan lampu hijau dan jaminan bahwa Simantri layak diberikan. "Hal-hal seperti ini juga mempengaruhi, sehingga verifikasi itu menjadi lemah. Kedepan kita akan perketat itu pengawasannya dengan verifikasi yang benar-benar matang untuk pemberian Simantri di daerah-daerah," ujar Teneng.

Selain masalah politik, masalah geografis di satu daerah juga memberikan dampak. Kata Teneng, ada pengajuan program Simantri yang dekat dengan perkotaan dimana lahan untuk menyediakan rumput sudah sangat susah. Bahkan tidak ada potensi penyediaan pakan rum-

Edisi : Kamis, 30 April 2015

Hal : 3



put untuk ternak yang akan dipelihara dalam kelompok tersebut. Namun tetap saja diloloskan. "Sudah tidak memenuhi syarat sebenarnya, tetapi jadi ewuh pakewuh karena ini usulan masyarakat. Tidak diberikan program menjadi sebuah protes dan kekecewaan. Akhirnya diberikan meskipun tidak memenuhi syarat," ungkap Teneng.

Dikatakan, pihaknya sudah mengumpulkan data-data terkait dengan verifikasi yang kurang bagus tersebut. Termasuk sudah melakukan pendataan dengan laporan di lapangan bahwa ada Simantri yang macet. "Ada Simantri yang memang dilaporkan bermasalah, sapinya hilang. Saya dapat investigasi, sapinya bukan hilang dijual, tetapi dipelihara petaninya di rumah karena pakannya sulit. Tetapi tidak semua. Kalau ada satu kasus bukan programnya yang gagal, tetapi pengelolaannya di kelompok itu

yang kita perbaiki," tegas mantan Karo Humas Pemprov Bali ini.

Menurut Teneng, laporan pendamping juga akan dievaluasi. "Tidak boleh ABS (Asal Bapak Senang). Karena faktor pendamping ini sangat mempengaruhi juga keberhasilan Simantri itu. Program ini kan program pro rakyat sebenarnya. Kalau pendampingnya main-main juga membuat nggak bagus itu hasilnya," tegas birokrat asal Desa Les, Kecamatan Tejakula, Buleleng ini.

Sementara untuk Tahun 2015, Pemprov Bali mengagas 50 unit Simantri lagi dengan anggaran APBD Bali. Kepala Bappeda Pemprov Bali, Putu Astawa, secara terpisah mengatakan, tahun anggaran 2015 Program Simantri yang direncanakan ada 50 unit ini akan tersebar di kabupaten dan kota. "Dananya APBD Tahun 2015 sebanyak 50 unit," ujar Astawa seraya menyebut biaya membangun Simantri per unit Rp 225 juta. nat

Edisi : Kamis, 30 April 2015

Hal : 3